JURNAL AKUNTANSI DAN BISNIS
Jurnal Program Studi Akuntansi

Available online <http://ojs.uma.ac.id/index.php/jurnalakundanbisnis>

**Analisis Strategis Pengelolaan Aset Daerah Berdasarkan
Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah No. 7**

***Strategic Analysis of Regional Asset Management Based on
Government Accounting Standard Statement No. 7***

Heri R Yuliantoro* & Hamdani Arifulsyah

Program Studi Akuntansi, Politeknik Caltex Riau, Indonesia.

*Corresponding Email: heriry@pcr.ac.id

Abstrak

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana penghapusan aset tetap yang mengalami kerusakan dan usang menurut Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan No.7 pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Kabupaten Bengkalis Provinsi Riau. Sumber data diperoleh dari hasil wawancara dan dokumentasi. Penelitian ini dilakukan dengan membandingkan perlakuan akuntansi yang telah dilakukan dengan standar. Hasil dari penelitian ini yaitu terdapat penghapusan aset tetap yang telah dilakukan perlu disesuaikan dengan standar. Penghapusan aset tetap perlu diiringi dengan penghapusan akumulasi penyusutan senilai Rp. 1.138.992.230.087. Sebagai perbaikan perlu dibuat jurnal koreksi untuk menghapus akumulasi penyusutan tersebut.

Kata Kunci: Aset Tetap; Penghapusan Aset; Jurnal Koreksi.

Abstract

The purpose of this study was to determine how the removal of damaged and obsolete fixed assets according to the Government Accounting Standards Statement No.7 at the Financial and Asset Management Agency of Bengkalis Regency, Riau Province. Sources of data obtained from interviews and documentation. This research was conducted by comparing the accounting treatments that have been carried out with standards. The results of this study that there are written off assets that have been done need to be adjusted to the standard. Write-off of fixed assets must be accompanied by the elimination of accumulated depreciation of Rp. 1,138,992,230,087. As an improvement, a correction journal needs to be made to remove the accumulated depreciation.

Keywords: Fixed Assets; Asset Written Off; Correction Journal.

How to Cite: Yuliantoro, H.R. & Arifulsyah, H. (2021). Analisis Strategis Pengelolaan Aset Daerah Berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah No. 7. *Jurnal Akuntansi dan Bisnis : Jurnal Program Studi Akuntansi*. 7 (1): 1-10.

PENDAHULUAN

Isu mengenai manajemen aset daerah menjadi pembahasan yang menarik dalam penelitian. Beberapa penelitian menemukan adanya pengelolaan aset daerah yang belum sepenuhnya mengacu pada peraturan yang ada serta belum dapat diandalkan (Kolinug, Ilat dan Pinatik: 2014; Priyono, 2013; Hasibuan, 2011). Padahal manajemen aset daerah yang baik akan menghasilkan pelayanan dan kesejahteraan yang baik pada masyarakat (Aira, 2014).

Dalam kerangka otonomi daerah, peranan manajemen aset sangat vital karena dalam pengelolaan aset Pemerintah Daerah diperlukan perencanaan yang matang mulai dari rencana pengadaan, pemanfaatan, sampai dengan penghapusan (Shabrina, 2014). Khusus terkait tema penghapusan aset menjadi hal yang sangat menarik karena banyak ditemui pemerintah daerah yang memilih tidak melakukan penghapusbukuan terhadap aset yang sudah rusak ataupun usang. Akibatnya secara fisik aset yang sudah tidak bisa dimanfaatkan lagi tersebut hanya tersimpan begitu saja.

Kabupaten Bengkalis adalah salah satu kabupaten di Provinsi Riau, Indonesia yang memiliki letak strategis, karena dilalui oleh jalur perkapalan internasional menuju ke selat Malaka. Wilayah bengkalis ini mencakup daratan bagian timur pulau sumatera dan wilayah kepulauan dengan luas adalah 7.793,93 km². Ibu kota kabupaten ini berada di Bengkalis tepatnya berada di pulau Bengkalis yang terpisah dari pulau sumatera. Pulau Bengkalis lebih searah dengan sungai Siak. Kota terbesar di kabupaten ini adalah Kota Duri di Kecamatan Mandau. Tercatat jumlah penduduk Kabupaten Bengkalis 498.335 jiwa dengan sifatnya yang heterogen, mayoritas penduduknya adalah penganut agama Islam.

Pendapatan daerah Bengkalis terbesar berasal dari minyak dan sektor perkebunan sawit dan karet. Pendapatan yang diperoleh dari hasil minyak dan sektor perkebunan sawit dan karet tersebut adalah sekitar Rp 7 triliun rupiah. Selain pendapatan yang cukup besar Kabupaten Bengkalis sendiri memiliki banyak aset daerah salah satunya yaitu aset tetap (Muttaqin, et.all, 2021). Aset tetap daerah adalah suatu kekayaan yang berwujud maupun tidak berwujud yang mempunyai nilai ekonomis, komersial, dan nilai tukar dimiliki pribadi atau instansi untuk mencapai tujuan atau aset adalah kekayaan (sumber daya) yang dimiliki oleh entitas bisnis yang bisa diukur secara jelas dengan menggunakan satuan uang.

Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Bengkalis mengelola aset tetap sebesar Rp. 13.120.123.023.591, namun dalam pengelolaan aset daerah, pada BPKAD masih ditemukan ketidaksesuaian pengelolaan aset berdasarkan PSAP No. 7. Hal ini terjadi karena kurangnya tenaga ahli Akuntansi, kurangnya kontrol dan kurangnya kesadaran pemerintah, dan terlalu banyaknya jumlah aset yang akan dikelola. Selama ini BPKAD juga belum melakukan penghapusan terhadap aset yang rusak berat dan aset yang telah habis umur ekonomisnya. Dalam mencatat aset yang rusak berat dan sudah habis masa umur ekonomisnya BPKAD melakukan pencatatan sebagai berikut:

Aset Lainnya (Dr)	Rp. XXX	Aset Tetap (Cr)	Rp. XXX
-------------------	---------	-----------------	---------

Berdasarkan pencatatan atas aset yang dihapuskan tersebut BPKAD belum menghapuskan akumulasi penyusutan atas aset tetap yang dihapuskan tersebut sehingga nilai aset yang terdapat pada laporan posisi keuangan (Neraca) tidak tepat dan akurat karena dalam daftar aset tersebut, masih ada nilai akumulasi penyusutan yang belum dihapuskan.

Menurut PSAP No. 7 aset tetap yang dihapuskan yaitu aset tetap yang sudah dipindahtangankan atau dijual, rusak atau usang, dan sudah tidak memiliki manfaat

ekonomis lagi bagi pemerintahan. Selama tahun 2017 aset tetap BPKAD telah banyak yang mengalami kerusakan, namun BPKAD belum melakukan penyesuaian atas penghapusan akumulasi penyusutan tersebut di neraca.

Dalam melakukan penghapusan aset, BPKAD terlebih dahulu membuat surat persetujuan penghapusan aset tetap yang ditujukan kepada gubernur, jika aset tersebut hilang atau rusak maka harus dibuktikan dengan melampirkan beberapa surat keterangan, namun jika aset tersebut dipindahtangankan, BPKAD harus mendata ulang pemilik aset yang baru, setelah persetujuan tersebut disetujui oleh gubernur maka selanjutnya pihak BPKAD melakukan penghapusan data aset, adapun bagian yang melakukan penghapusan data tersebut yaitu bagian aset.

Berdasarkan penjelasan proses penghapusan aset tetap yang dilakukan oleh BPKAD tersebut, dapat dilihat bahwa BPKAD tidak melakukan pencatatan akuntansi terhadap aset tetap yang dikelolanya sesuai dengan PSAP No. 7 tentang aset tetap pemerintahan, sehingga tidak adanya jurnal atas penghapusan akumulasi penyusutan aset tersebut di neraca, sehingga nilai akumulasi penyusutan aset tetap yang ada di neraca tidak menggambarkan nilai aset tetap yang sesungguhnya sesuai dengan data penghapusan aset yang dimiliki oleh bagian aset tersebut. Setiap instansi pemerintah perlu adanya perlakuan akuntansi terhadap aset tetap yang dimilikinya. Dalam hal ini pengakuan, penilaian, pengukuran dan pengungkapan pada masing-masing aset tetap sangat perlu diperhatikan karena hal tersebut dapat menunjukkan kewajaran instansi dalam pencatatan akuntansi (Rahmadhani, 2018). Agar sejalan dengan prinsip akuntansi yang lazim yaitu PSAP No.7.

Berdasarkan dari latar belakang masalah diatas, dapat dirumuskan rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu bagaimanakah penghapusan aset tetap daerah pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bengkalis berdasarkan PSAP No. 7 (Vina,et.all, 2021). Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk membandingkan apakah perlakuan akuntansi yang telah diterapkan dalam penghapusan aset sudah sesuai dengan PSAP No.7.

Bastian (2010) mendefinisikan Akuntansi Pemerintahan sebagai sistem pengukuran kinerja pemerintahan yang termasuk dalam bidang akuntansi sektor publik. Dengan kata lain, akuntansi mendukung pemerintah dalam mempertanggungjawabkan keputusan sumber daya apa yang akan dipenuhi.

Pemerintah tidak berorientasi pada laba sehingga dalam akuntansi pemerintahan tidak ada laporan laba (income statement) dan treatment akuntansi yang berkaitan dengannya. Pemerintah membukukan anggaran ketika anggaran tersebut dibukukan pengeluaran modal (Bilqis, 2015). Nordiawan (2007) menyatakan Akuntansi Pemerintah memiliki tiga tujuan pokok yaitu "Pertanggungjawaban, manajerial dan pengawasan."

Menurut Baridwan (2011) secara umum aset tetap dapat didefinisikan sebagai aset-aset yang berwujud yang sifatnya relatif permanen yang digunakan dalam kegiatan perusahaan yang normal. Dari sudut pandang ekonomi, aset adalah barang atau sesuatu barang dimiliki oleh seseorang sebuah organisasi baik swasta maupun pemerintah yang memiliki nilai ekonomi, nilai komersial, dan nilai tukar (Sugiama:2013).

Aset tetap dalam PSAP 07 diklasifikasikan berdasarkan kesamaan sifat atau fungsinya dalam aktivitas operasi entitas. Klasifikasi aset tetap adalah sebagai berikut (Arif, 2010): a) Tanah; b) Peralatan dan Mesin; c) Gedung dan Bangunan; d) Jalan, Irigasi, dan Jaringan; e) Aset Tetap Lainnya; e) Konstruksi Dalam Pengerjaan

Menurut PSAP No. 7, suatu aset tetap dieliminasi dari neraca ketika dilepaskan atau bila aset secara permanen dihentikan penggunaannya dan tidak ada manfaat ekonomik

masa yang akan datang. Penghapusan barang milik daerah meliputi: a) Penghapusan dari daftar barang pengelola atau kuasa pengelola; b) Penghapusan dari daftar barang milik daerah

Pada saat aset tetap dilepaskan atau apabila aset tersebut secara permanen dihentikan penggunaannya dan tidak mempunyai masa manfaat ekonomi masa depan maka aset tetap tersebut dieliminasi dari neraca. Aset tetap yang secara permanen dihentikan atau dilepaskan harus dieliminasi dari neraca diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan. Aset tetap yang tidak memenuhi definisi aset tetap dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah dan dipindahkan ke pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya (Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah (PSAP) No. 7.

Tanah dan konstruksi dalam pengerjaan disajikan di neraca dalam kelompok aset tetap sebesar biaya perolehan atau nilai wajar pada saat aset tersebut diperoleh. Peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, aset tetap lainnya disajikan di neraca dalam kelompok aset tetap sebesar biaya perolehannya dikurangi dengan akumulasi penyusutan. Untuk aset tetap lainnya berupa hewan, tanaman, buku perpustakaan tidak dilakukan penyusutan secara periodik, melainkan diterapkan penghapusan pada saat aset tetap lainnya tersebut sudah tidak dapat digunakan atau mati dan untuk penyusutan atas aset tetap-renovasi dilakukan sesuai dengan umur ekonomis mana yang lebih pendek (which ever is shorter) antara masa manfaat aset dengan masa pinjaman/sewa. Akumulasi Penyusutan disajikan dalam angka negatif untuk mengurangi total nilai aset tetap (Abdul dan Sya, 2014)

METODE PENELITIAN

Metode dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif deskriptif. Data aset tetap yang dihapus dianalisis secara mendalam, dikaji secara kasus per kasus dan dibandingkan dengan standar akuntansi pemerintahan no. 7. Selanjutnya dilakukan penyesuaian dan diberi ulasan penjelas terkait dengan hasil perbandingan tersebut.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Bengkalis merupakan instansi pemerintah yang memiliki tugas salah satunya yaitu mengelola aset tetap daerah. Adapun aset tetap yang dikelola oleh BPKAD terdiri dari instansi pemerintah seperti Balitbang, Bapenda, Bapedda, BKPP, BPKAD PM, Dinas Kelautan, Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, Dinas Perhubungan, DPPPA, Inspektorat, Kantor Camat, PU PR, RSUD Bengkalis, dan RSUD Mandau.

Pada tahun 2017 beberapa instansi pemerintah tersebut memiliki data aset tetap yang dihapuskan dan dilaporkan kepada BPKAD. Setelah itu BPKAD akan melakukan pengajuan penghapusan aset tetap kepada Gubernur, dan setelah disetujui oleh Gubernur maka pihak BPKAD melakukan penghapusan untuk aset tersebut pada bagian aset. Selanjutnya bagian aset akan melaporkan kepada bagian keuangan atas daftar aset tetap yang akan dihapuskan, kemudian bagian keuangan akan membuat jurnal atas penghapusan aset tetap tersebut. Namun dalam melakukan penghapusan aset tetap di Neraca, BPKAD tidak melakukan penghapusan atas akumulasi penyusutan atas aset tetap tersebut. Akibatnya nilai aset tetap yang tertera pada Neraca tidak menggambarkan nilai aset tetap yang akurat karena tidak adanya penyesuaian atas penghapusan aset tetap tersebut.

Pada saat aset tetap dilepaskan atau apabila aset tersebut secara permanen dihentikan penggunaannya dan tidak mempunyai masa manfaat ekonomi masa depan maka aset tetap tersebut dieliminasi dari neraca. Aset tetap yang secara permanen dihentikan atau dilepaskan harus dieliminasi dari neraca diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan.

Pada tahun 2017 BPKAD Bengkalis memiliki aset tetap yang telah dihapuskan oleh instansi pemerintah seperti balitbang, dinkes, bapenda, dan masih banyak lagi yang akan dilampirkan pada saat pembahasan, sehingga diperlukan jurnal penyesuaian atas penghapusan aset tetap tersebut. Penghapusan aset tetap terjadi karena adanya beberapa faktor seperti rusak berat, usang (sudah habis umur ekonomisnya), dan dijual atau dipindahtangankan.

Pada tahun 2017 Balitbang memiliki data aset tetap yang diajukan kepada BPKAD untuk dilakukan penghapusan, tabel 1 berikut ini merupakan data aset tetap yang akan dihapuskan oleh Balitbang yang diajukan kepada BPKAD.

Tabel 1 Data Penghapusan Aset Balitbang
Sumber Tabel: Data BPKAD

No	Nama Barang	Tahun Perolehan	Jumlah	Harga Satuan (Rp)	Total Nilai Perolehan (Rp)	Akumulasi Penyusutan (Rp)	Kondisi Barang
1	Kendaraan Bermotor Beroda Tiga Lain-lain	2011	1	38.697.166	38.697.166	38.697.166	Rusak Berat
2	Gerobak Dorong	2014	5	1.061.040	5.305.200	5.305.200	-
3	Mesin Hitung Manual	2009	5	387.500	1.687.500	1.687.500	Rusak Berat
4	Mesin Hitung Manual	2010	4	639.500	2.558.000	2.558.000	Rusak Berat
5	Mesin Hitung Manual	2011	2	455.625	911.250	911.250	Rusak Berat
6	Mesin Fotocopy dengan Kertas Folio	2011	1	25.107.500	25.107.500	25.107.500	Rusak Berat
7	Mesin Fotocopy dengan Kertas Folio	2012	3	3.190.000	9.570.000	9.570.000	Rusak Berat
8	Mesin Fotocopy dengan Kertas Folio	2012	4	891.000	3.564.000	3.564.000	Rusak Berat
9	Mesin Fotocopy dengan Kertas Folio	2012	2	935.000	1.870.000	1.870.000	Rusak Berat
10	Mesin Fotocopy dengan Kertas Folio	2012	6	1.034.000	6.204.000	6.204.000	Rusak Berat
11	Mesin Fotocopy	2012	3	660.000	1.980.000	1.980.000	Rusak Berat
12	Mesin Fotocopy dengan Kertas Folio	2012	1	737.000	737.000	737.000	Rusak Berat
13	Rak Kayu	2005	1	1.500.000	1.500.000	1.500.000	Rusak Berat
14	Brankas	2005	1	1.000.000	1.000.000	1.000.000	Rusak Berat
15	Alat Penghancur Kertas	2010	2	11.560.000	23.120.000	23.120.000	Rusak Berat
16	Lemari Kayu	2005	1	1.000.000	1.000.000	1.000.000	Rusak Berat
17	Meja Rapat	2005	1	1.415.000	1.415.000	1.415.000	Rusak Berat
18	Meja Rapat	2006	1	8.000.000	8.000.000	8.000.000	Rusak Berat
19	Meja Rapat	2008	1	13.500.000	13.500.000	13.500.000	Rusak Berat
20	Kursi Lipat	2005	1	400.000	400.000	400.000	Rusak Berat
21	Meja Komputer	2006	5	167.000	835.000	835.000	Rusak Berat
TOTAL						149.698.616	

Berdasarkan tabel 1 dapat diketahui bahwa aset tetap yang akan dihapus pada Balitbang yaitu sebesar Rp. 149.698.616 dengan nilai akumulasi penyusutan sebesar

Rp.149.698.616. Nilai aset tetap tersebut terdiri dari peralatan seperti meja, printer, lemari, rak kayu, dan peralatan dapur.

Sebelumnya BPKAD membuat jurnal untuk penghapusan aset tetap tersebut seperti berikut ini:

Tabel 2 Jurnal Penghapusan BPKAD

Tanggal	Uraian	Ref	Debit (Rp)	Kredit (Rp)
08 Mei 2017	Aset Lain-lainAlat Rumah Tangga		149.698.616	149.698.616

Sumber Tabel: Data BPKAD

Berdasarkan tabel 2 dapat diketahui bahwa BPKAD hanya melakukan penghapusan pada aset tetapnya saja, sedangkan untuk akumulasi penyusutan atas aset tetap yang telah rusak tersebut tidak dihapuskan, sehingga nilai akumulasi pada aset tetap tersebut terlalu tinggi pada laporan neraca BPKAD pada tahun 2017. Berikut ini merupakan jurnal koreksi atas kesalahan pencatatan jurnal tersebut:

Tabel 3 Jurnal Koreksi Aset Tetap Balitbang

No	Keterangan	Debit (Rp)	Kredit (Rp)
1	Akum. Peny. Alat Angkutan Aset Lainnya	38.697.166	38.697.166
2	Akum. Peny. Alat Angkutan Aset Lainnya	5.305.200	5.305.200
3	Akum. Peny. Alat Rumah Tangga Aset Lainnya	1.687.500	1.687.500
4	Akum. Peny. Alat Rumah Tangga Aset Lainnya	2.558.000	2.558.000
5	Akum. Peny. Alat Rumah Tangga Aset Lainnya	911.250	911.250
6	Akum. Peny. Alat Rumah Tangga Aset Lainnya	25.107.500	25.107.500
7	Akum. Peny. Alat Rumah Tangga Aset Lainnya	9.570.000	9.570.000
8	Akum. Peny. Alat Rumah Tangga Aset Lainnya	3.564.000	3.564.000
9	Akum. Peny. Alat Rumah Tangga Aset Lainnya	1.870.000	1.870.000
10	Akum. Peny. Alat Rumah Tangga Aset Lainnya	6.204.000	6.204.000
11	Akum. Peny. Alat Rumah Tangga Aset Lainnya	1.980.000	1.980.000
12	Akum. Peny. Alat Rumah Tangga Aset Lainnya	737.000	737.000
13	Akum. Peny. Alat Rumah Tangga Aset Lainnya	1.500.000	1.500.000
14	Akum. Peny. Alat Rumah Tangga Aset Lainnya	1.000.000	1.000.000
15	Akum. Peny. Alat Rumah Tangga Aset Lainnya	23.120.000	23.120.000
16	Akum. Peny. Alat Rumah Tangga Aset Lainnya	1.000.000	1.000.000
17	Akum. Peny. Alat Rumah Tangga Aset Lainnya	1.415.000	1.415.000
18	Akum. Peny. Alat Rumah Tangga Aset Lainnya	8.000.000	8.000.000
19	Akum. Peny. Alat Rumah Tangga Aset Lainnya	13.500.000	13.500.000
20	Akum. Peny. Alat Rumah Tangga Aset Lainnya	400.000	400.000
21	Akum. Peny. Alat Rumah Tangga Aset Lainnya	835.000	835.000
	TOTAL	149.698.616	149.698.616

Sumber Tabel: Data Hasil Olahan

Dari tabel 3 dapat dilihat akumulasi penyusutan peralatan dihapus di sebelah debit dan aset lainnya dihapus di sebelah kredit. Dengan adanya jurnal koreksi tersebut, nilai akumulasi penyusutan atas aset tetap tersebut akan turun dari nilai sebelumnya. Selanjutnya aset lainnya juga bernilai 0, karena menurut PSAP No.7 aset tetap yang mengalami rusak berat harus dihapuskan nilainya sesuai dengan harga perolehan.

Bapenda yaitu salah satu instansi pemerintah yang seluruh aset nya dikelola oleh BPKAD, pada tahun 2017 Bapenda memiliki data aset tetap yang dilaporkan kepada BPKAD untuk dilakukan penghapusan, namun oleh BPKAD penghapusan atas aset tetap tersebut belum dilakukan penyesuaian.

Pada tahun 2017, Bapedda melaporkan data aset tetap yang dihapuskan berdasarkan kondisi fisik aset tetap tersebut yang sudah rusak berat. Sehingga diperlukannya

penyesuaian nilai aset tetap di Neraca BPKAD. Pada tabel 4 berikut ini merupakan data aset tetap yang akan dihapuskan pada Bapedda tahun 2017.

Tabel 4 Data Penghapusan Aset Tetap Bapedda

No	Nama Barang	Tahun Perolehan	Jumlah	Harga Satuan (Rp)	Harga Perolehan (Rp)	Akumulasi Penyusutan (Rp)
1	Genset	2002	1	98.425.000	98.425.000	98.425.000
2	Mesin Tik	2003	1	1.500.000	1.500.000	1.500.000
3	Meja Rapat	1994	20	25.000	500.000	500.000
4	Meja Rapat	1994	1	500.000	500.000	500.000
5	Meja Tulis	1994	10	540.000	5.400.000	5.400.000
6	Meja Tulis	1994	1	450.000	450.000	450.000
7	Kursi Tamu	1994	4	100.000	400.000	400.000
8	Kursi Tangan	2001	8	700.000	5.600.000	5.600.000
9	Lemari Kayu	2002	3	500.000	1.500.000	1.500.000
10	Kursi Tamu	2002	3	400.000	1.200.000	1.200.000
11	AC 1 PK	2005	1	10.000.000	10.000.000	10.000.000
12	AC	2005	2	5.000.000	10.000.000	10.000.000
13	Gorden	2011	1 (set)	92.915.000	92.915.000	92.915.000
14	Meja Rapat	2012	2	12.155.000	24.310.000	24.310.000
15	Komputer	2002	1	14.000.000	14.000.000	14.000.000
16	Komputer	2006	1	181.510.000	181.510.000	181.510.000
17	Laptop	2006	3			
18	Laptop Tablet	2006	1			
19	Laptop Acer Div	2009	1	27.331.700	27.331.700	27.331.700
20	Laptop (HP)	2009	3	16.969.700	50.909.100	50.909.100
21	Laptop (HP)	2010	3	15.000.000	45.000.000	45.000.000
22	Laptop Tablet	2010	1	23.850.000	23.850.000	23.850.000
23	Laptop (Toshiba)	2011	1	14.000.666	14.000.666	14.000.666
24	Komputer	2012	1	9.750.000	9.750.000	9.750.000
25	Lemari Arsip	2002	1	1.500.000	1.500.000	1.500.000
26	Lemari Buku Perpustakaan	2005	3	1.000.000	3.000.000	3.000.000
27	Peralatan Kantor dan Rumah Tangga				642.101.906	642.101.906
28	Mesin Fax	2002	1	1.500.000	1.500.000	1.500.000
29	Mesin Fax	2006	1	5.000.000	5.000.000	5.000.000
30	Alat Studio dan Alat Komunikasi				6.500.000	6.500.000
TOTAL					648.601.906	648.601.906

Sumber Tabel: Data BPKAD

Berdasarkan tabel 4 diketahui total peralatan kantor dan rumah tangga yang akan dilakukan penghapusan sebesar Rp. 642.101.906 sedangkan peralatan studio dan komunikasi sebesar Rp. 6.500.000.

Selain itu, pada Dinas Kesehatan juga terdapat data aset daerah yang perlu penyesuaian. Tabel 5 berikut ini merupakan data penghapusan aset pada Dinas Kesehatan.

Tabel 5 Data Penghapusan Aset Tetap Dinas Kesehatan

No	Nama Barang	Tahun Perolehan	Jumlah	Harga Satuan (Rp)	Total Nilai Perolehan (Rp)	Akumulasi Penyusutan (Rp)	Kondisi Barang
1	Station Wagon	2008	1	155.044.792	155.044.792	155.044.792	Rusak Berat
2	Mobil Ambulance	2001	3	101.200.000	303.600.000	303.600.000	Rusak Berat
3	Station Wagon	2004	1	94.400.000	94.400.000	94.400.000	Rusak Berat
4	Mobil Ambulance	2000	1	86.000.000	86.000.000	86.000.000	Rusak Berat
5	Mobil Ambulance	1995	1	21.100.000	21.100.000	21.100.000	Rusak Berat
6	Station Wagon	1997	1	44.500.000	44.500.000	44.500.000	Rusak Berat
Total Alat Angkutan					704.644.792	704.644.792	
7	Bangunan Gedung Kantor Permanen	2005	1	147.000.000	147.000.000	87.791.667	Rusak Berat
8	Bangunan Gedung Kantor Permanen	2005	1	630.000.000	630.000.000	398.887.304	Rusak Berat
9	Bangunan Gedung Kantor Permanen	2013	1	28.879.000	28.879.000	18.956.995	Rusak Berat
10	Rumah Negara Golongan III lain-lain	2013	1	202.606.600	202.606.600	194.157.576	Rusak Berat
Total Gedung dan Bangunan					1.008.485.600	699.793.542	
Jumlah Keseluruhan					1.713.130.392	699.793.542	

Sumber Tabel: Data BPKAD

Selama ini BPKAD belum pernah melakukan penghapusan aset tetap sesuai dengan PSAP No.7. BPKAD hanya melakukan pencatatan penghapusan aset tetap tersebut pada bagian aset, menurut BPKAD aset tetap yang telah rusak dan usang tersebut masih memiliki nilai sehingga tidak perlu dihapuskan pada laporan keuangannya, sehingga neraca yang dihasilkan tidak menggambarkan nilai aset tetap yang sebenarnya karena jika ada penghapusan aset maka seharusnya nilai aset tetap tersebut dikurangkan sesuai dengan harga perolehannya. Setelah dilakukan penyesuaian untuk penghapusan aset tersebut, maka disusunlah kembali neraca yang sesuai dengan penyesuaian pada pembahasan-pembahasan sebelumnya. Tabel 6 berikut ini merupakan perbandingan laporan neraca sebelum dan setelah penyesuaian.

Tabel 6 Neraca Perbandingan

Neraca BPKAD		
Per 31 Desember 2017		
	Setelah dilakukan Penyesuaian	Sebelum dilakukan Penyesuaian
	Dalam (Rp)	Dalam (Rp)
ASET		
Aset Lancar	36.438.771.700	36.438.771.700
Aset Tetap	915.494.837.937	912.275.404.236
Aset Lainnya	113.602.726.421	117.130.852.180
TOTAL ASET	1.065.536.336.058	1.065.845.028.116
Total Kewajiban	56.895.200	56.895.200
Total Ekuitas	1.065.479.440.858	1.065.788.132.916

TOTAL KEWAJIBAN + EKUITAS	1.065.536.336.058	1.065.845.028.116
------------------------------	-------------------	-------------------

Sumber Tabel: Data Hasil Olahan

Berdasarkan tabel 6 dapat dilihat perbedaan total aset dan total ekuitas setelah dan sebelum dilakukannya penyesuaian. Setelah dilakukan penyesuaian, aset tetap pada BPKAD mengalami kenaikan sebesar Rp. 3.219.883.701 dimana selisih tersebut karena adanya penghapusan akumulasi penyusutan aset tetap pada tahun 2017 sebesar Rp. 2.618.170.316 sehingga aset tetap yang dilaporkan lebih tinggi. Jika dilihat penurunan yang terjadi pada aset lainnya disebabkan karena adanya koreksi yang menyebabkan nilai aset lainnya turun sebesar Rp 3.528.575.759. Pada penghapusan aset tetap tersebut untuk aset tetap yang nilai buku nya tidak bernilai 0 maka akan timbul selisih yang dibebankan ke akun “defisit penghapusan aset”, kemudian akun tersebut akan mengurangi ekuitas sehingga ekuitas juga akan berpengaruh nilainya sesuai dengan penurunan aset tetap tersebut.

Kekeliruan dalam pelaporan aset tetap pada neraca akan menimbulkan masalah dalam pengelolaan aset tersebut, karena jika terjadi audit aset tetap yang telah dihapuskan tersebut harus bisa ditelusuri secara fisik sedangkan aset tersebut sudah rusak atau tidak dapat digunakan lagi.

SIMPULAN

Berdasarkan pembahasan yang telah dilakukan sebelumnya mengenai penghapusan aset berdasarkan PSAP No.7, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa BPKAD belum pernah melakukan penyesuaian atas penghapusan atas akumulasi penyusutan aset tetap yang telah rusak dan telah habis umur manfaatnya. BPKAD hanya melakukan penghapusan atas aset tetapnya tersebut dan menambahkan aset tetap tersebut kedalam aset lainnya sehingga nilai aset tetap yang dilaporkan pada neraca tersebut lebih tinggi karena tidak dihapusnya akumulasi penyusutan tersebut.

Setelah dilakukan penyesuaian atas penghapusan aset tetap, terdapat perbedaan nilai aset tetap yang menunjukkan adanya penurunan aset sebesar Rp. 1.026.619.535.856 yang diakibatkan adanya penghapusan akumulasi penyusutan aset tetap sehingga nilai aset tetap akan mengalami penurunan setelah dilakukannya penghapusan pada aset tetap tersebut beserta akumulasi penyusutannya.

Adapun saran yang diberikan penulis atas penelitian ini sebaiknya BPKAD melakukan jurnal koreksi atas penghapusan aset tetap tersebut pada laporan neraca agar laporan tersebut lebih akurat dan sesuai dengan nilai aset tetap yang sesungguhnya. Selain itu BPKAD memiliki dokumentasi lengkap atas aset tetap yang dimiliki, sehingga akan mempermudah dalam pengelolaan aset tetap yang dimiliki.

UCAPAN TERIMAKASIH

Kami mengucapkan terima kasih atas bantuan semua pihak terutama saudara Yolla Andressie yang telah menyediakan data yang digunakan pada penelitian ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Aras, A. (2014). Peran Manajemen Aset Dalam Pembangunan Daerah, *Jurnal Kutubhakah*, 17(1).
- Arif, B. (2010). *Akuntansi Pemerintahan*. Jakarta: Salemba Empat.
- Arnita, V., Aulia, A., Muttaqin, E., & Suryani, S. (2021). Analisis Pertumbuhan Laba Dalam Rasio Keuangan Pada Pt Semen Indonesia Tbk. *Economics, Business and Management Science Journal*, 1(1), 1-5. doi:<https://doi.org/10.34007/ebmsj.v1i1.1>
- Baridwan, Z. (2011). *Intermediate Accounting Edisi 8*. Yogyakarta: BPFE.

- Bastian, I. (2010). *Akuntansi Sektor Publik Suatu Pengantar Edisi Ketiga*. Jakarta: Erlangga.
- Bilqis, M. H., & Rusdan, M. A. (2015). Pengaruh Manajemen Laba Terhadap Kebijakan Deviden Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2009-2011. *JURNAL AKUNTANSI DAN BISNIS: Jurnal Program Studi Akuntansi*, 1(1).
- Halim, A., & Kusufi, S. (2014). *Akuntansi Sektor Publik*. Jakarta: Salemba Empat.
- Hasibuan, I. K., & Lubis, R. (2011). Peran Public Relations sebagai Pendukung Manajemen di Rumah Sakit Umum Dr. Pirngadi Kota Medan. *Analitika: Jurnal Magister Psikologi UMA*, 3(1), 44-52.
- Karnanto, P. (2013). Keandalan Informasi Laporan Keuangan Daerah Berbasis Akrua: Kajian Pengelolaan Aset Tetap Daerah Kabupaten Sampang, *Jurnal Akuntansi: El Muhasaba*, 4(1).
- Kemala, S.N. (2014). Efektivitas Pengamanan Aset dalam Mewujudkan Akuntabilitas di Pemerintah Kota Surabaya, *Jurnal Kebijakan dan Manajemen Publik*, 2(1).
- Kolinug, Monika Sutri, Ilat, Ventje, dan Pinatik, Sherly. (2015). Analisis Pengelolaan Aset Tetap Pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kota Tomohon, *Jurnal EMBA* 818 3(1): 818-830.
- Muttaqin, E., Sari, W., Ritonga, P., & Fadillah, D. (2021). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan Terhadap Belanja Modal Pemerintahan Daerah Kabupaten. *Economics, Business and Management Science Journal*, 1(1), 22-28. doi:<https://doi.org/10.34007/ebmsj.v1i1.7>
- Nordiawan, D. (2007). *Akuntansi Pemerintahan*. Jakarta: Salemba Empat.
- Rahmadhani, S. N. (2018). EVALUASI EFEKTIVITAS PENGENDALIAN INTERNAL AKUNTANSI ATAS JARINGAN DISTRIBUSI LISTRIK OLEH PT PLN (PERSERO) STUDI KASUS: DI SUMATERA UTARA. *JURNAL AKUNTANSI DAN BISNIS: Jurnal Program Studi Akuntansi*, 4(2), 24-30.
- Sugiama. (2013). *Manajemen Aset*. Jakarta: Salemba Empat.